

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan negara Indonesia, telah berkomitmen untuk meningkatkan moral dari seluruh rakyatnya. Komitmen tersebut menyiratkan bahwa pentingnya sebuah pendidikan karakter untuk diimplementasikan. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang tertuang dalam Pasal 3 menyatakan bahwa "*Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab*". Berdasarkan Undang-Undang tersebut, menyatakan bahwa fungsi dari pendidikan dapat menciptakan peserta didik yang secara utuh memiliki berbagai macam kecerdasan yang dibutuhkan, baik itu kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual maupun kecerdasan kinestetik.

Selain itu, pendidikan nilai / moral memang lah sangat diperlukan dalam suatu proses pendidikan yang dilaksanakan baik dalam pendidikan yang bersifat formal maupun pendidikan yang bersifat non formal. Pada dasarnya suatu pendidikan tersebut merupakan tanggung jawab kita bersama, sehingga diperlukannya kerjasama dalam setiap aspek untuk menjalankannya. Proses pembelajaran nilai / moral yang melibatkan peranan sekolah sebagai salah satu tempat pendidikan formal memandang bahwa aspek nilai / moral yang dimiliki oleh seseorang merupakan aspek yang paling utama yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pendidikan nilai / moral tersebut sangatlah dibutuhkan ketika proses pendidikan yang terjadi dilingkungan masyarakat sudah terasa melemah. Hal ini mengakibatkan peranan dari suatu sekolah sebagai tempat penyelenggara pendidikan sangatlah penting dalam keberadaannya untuk mendidik anak-anak yang berada di lingkungan tersebut.

Menurut Agustian (2008) bangsa Indonesia telah mengalami kemerosotan moral. Kemerosotan moral tersebut dapat kita lihat di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Moral yang mengalami kemerosotan dapat dikategorikan seperti kurangnya tindakan kejujuran, kurangnya sikap bertanggung jawab, tidak pernah berpikir maju dan jauh ke depan, kurangnya sikap kedisiplinan, kurangnya rasa kebersamaan, kurangnya tindakan keadilan, dan kurangnya rasa kepedulian. Berdasarkan hal tersebut, kemerosotan moral yang sedang terjadi saat ini yaitu bukanlah tanggung jawab dari pemerintah selaku pemegang dan pembuat aturan. Namun melainkan tanggung jawab kita bersama selaku individu yang hidup saling berdampingan. Menurut Nopan Omeri (2015), bahwa dalam pengembangan suatu karakter bangsa bisa pula dilakukan dengan cara berkembangnya suatu karakter yang ada dalam diri suatu individu. Namun, karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya, dan mengedepankan kebudayaan tertentu, maka berkembangnya suatu karakter yang ada dalam diri individu tersebut hanya dapat dilakukan di tempat dimana ia berada. Jadi dalam kata lain lingkungan tempat tinggalnya sangat berpengaruh besar dalam perkembangan karakter dari seseorang. Maka dari itu, berdasarkan hal tersebut kita selaku orang yang peduli dengan perkembangan karakter seseorang perlu suatu tindakan yang nyata yang bertujuan untuk meningkatkan karakter dalam diri seseorang. Upaya dalam meningkatkan karakter tersebut dapat berorientasikan pada suatu pembelajaran yang melibatkan banyak aspek supaya hasil yang nantinya diperoleh lebih optimal. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Ajat Sudrajat (2011), ia menyatakan bahwa salah satu jalan untuk mengembalikan moral manusia yang telah mengalami penurunan yaitu dengan cara melaksanakan pendidikan karakter. Selama masa pendidikan tersebut harus dikawal keberlangsungannya oleh semua pihak, seperti keluarga, lembaga pendidikan, serta lingkungan masyarakat supaya pendidikan karakter tersebut dapat berjalan dengan baik.

Secara spesifik, salah satu krisis moral / karakter yang muncul pada saat ini yaitu semakin maraknya tindakan korupsi dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Wicipto Setiadi (2018), bahwa tindakan korupsi berdampak besar kepada kehidupan bermasyarakat, individu itu sendiri, suatu generasi terutama generasi muda, politik dan ekonomi dari suatu bangsa, serta sifat dalam hal pekerjaan atau

birokrasi. Namun secara jelas hambatan yang telah dirasakan dalam suatu tindakan untuk pemberantasan korupsi tersebut cukup lah beragam, seperti yang dirasakan pada segi struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Maka dari itu perlu kesadaran dari semua pihak untuk menyatukan semua pendapat bahwa tindakan korupsi tersebut sangatlah merugikan bagi semua pihak tanpa terkecuali. Pemerintah sendiri saja sebagai pemangku kebijakan tidak mungkin dapat merubah suatu sistem yang telah membudaya tersebut jika tanpa adanya bantuan, dorongan, dan pengawasan dari masyarakatnya. Upaya dalam mendukung kegiatan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya tindakan dari seluruh masyarakat selaku aspek yang selalu berdampingan dalam kehidupan sehari-hari jika melihat hal-hal yang menjurus ke dalam suatu tindakan korupsi. Berdasarkan hal tersebut, bahwa kemerosotan moral yang terjadi merupakan salah satu tanda bahwa mutu pendidikan yang ada mengalami penurunan dari mutu pendidikan yang ada. Maka dari itu, perlu upaya untuk mengembalikan mutu pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan yaitu berhubungan dengan pengelolaan maupun manajemen dalam suatu tindakan peningkatan mutu pendidikan. Menurut Muhammad Fadhli (2017), ia memaparkan dalam penelitiannya bahwa untuk mengembalikan atau meningkatkan mutu pendidikan perlu adanya kerjasama yang selaras antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, peserta didik, wali peserta didik, dan masyarakat. Jika semua komponen tersebut semua terlibat di dalamnya, maka segala sesuatu yang termasuk peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai dengan baik.

Menyadari tentang pentingnya untuk mengembalikan karakter positif dalam setiap warganya, maka Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Kemudian Perpres tersebut diperjelas dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi, Setelah Inpres tersebut terbit, maka Kemendagri turut serta mengawal Inpres tersebut dengan sesegera mungkin melakukan pembinaan, penguatan, dan menginstruksikan kembali kepada pemangku kebijakan yang berada dalam lingkungan pemerintahan kabupaten/kota untuk segera merancang skema yang baik

terkait pelaksanaan pendidikan anti korupsi guna mematuhi instruksi presiden tersebut dan seruan ini tertuang dalam Surat Edaran Kemendagri nomor 420/4048/SJ.

Berdasarkan dua surat edaran tersebut, maka dari itu khususnya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat segera merancang serta mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan pencegahan tindakan korupsi tersebut. Surat edaran itu tertuang dalam Peraturan Bupati Bandung Barat nomor 42 tahun 2019 yang isinya memaparkan terkait penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan dasar. Skema yang terbentuk dalam hal pencegahan tindakan korupsi tersebut yaitu terciptanya suatu program yang terbentuk atas kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara langsung dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Program yang tercipta tersebut merupakan suatu pembelajaran yang diberi nama Inseri Pendidikan Anti Korupsi (IPAK). Pembelajaran tersebut bukanlah suatu mata pelajaran baru yang dibelajarkan kepada peserta didik, melainkan pembelajaran yang sifatnya disisipkan kedalam pembelajaran yang lain serta melihat makna dari kompetensi dasar yang dicapai. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Ahmad Zuber (2018), ia memaparkan bahwa kegiatan mengintegrasikan kurikulum dalam menanamkan pendidikan anti korupsi terhadap suatu pembelajaran merupakan hal nyata yang telah ditawarkan sebagai salah satu tindakan dalam menanamkan nilai anti korupsi kepada peserta didik. Beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran tersebut yaitu sebagai mata pelajaran tersendiri dalam kata lain tidak disisipkan kedalam mata pelajaran yang lainnya namun diluar dari jam belajar yang ada, yang kedua sebagai model pembelajaran yang terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran yang ada, yang ketiga sebagai model pembelajaran di luar pembelajaran yang dilakukan di sekolah, yang keempat sebagai model pembudayaan, dan pembiasaan terhadap nilai-nilai anti korupsi dalam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik, serta yang terakhir sebagai model pembelajaran dari gabungan beberapa model yang ada.

Melalui surat edaran Bupati Kabupaten Bandung Barat tersebut, bahwa Program pembelajaran Inseri Pendidikan Anti Korupsi (IPAK) ini dibuat dan diaplikasikan pada jenjang pendidikan dasar dengan tujuan untuk menciptakan

generasi mendatang yang tidak berperilaku koruptif. Sebenarnya tindakan korupsi ini bukan semata-mata kegiatan yang hanya mencuri uang kemudian diberi hukuman setelah itu selesai, tetapi di dalamnya terdapat kompleksitas permasalahan sebab akibat yang muncul jika kita melakukan hal tersebut. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat telah menyusun dan membuat contoh dalam pembuatan silabus, Rencana Pelaksanaan pembelajaran, dan modul untuk program pembelajaran yang dilaksanakan di rumah peserta didik masing-masing. Untuk modul tersebut, dalam pelaksanaannya mengajak seluruh wali dari peserta didik supaya ikut berperan aktif di dalamnya. Mereka berperan sebagai pengawas, penilai, dan pencipta lingkungan belajar yang kondusif bagi anaknya. Hal tersebut sudah memang seharusnya dilakukan oleh setiap wali peserta didik di dalam keseharian kehidupan mereka. Namun dalam kenyataannya tidak semua wali peserta didik memahami pentingnya hal tersebut. Kondisi seperti itu biasanya banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi hal tersebut yaitu latar belakang pendidikan mereka yang dapat mempengaruhi keterampilan yang mereka miliki. Sejalan dengan yang diutarakan oleh Sokip, dkk (2019), bahwa setiap orang tua dari para peserta didik membutuhkan keterampilan yang diperlukan dalam mendidik anaknya sehingga nantinya anak tersebut dapat memiliki kepribadian yang baik. Selain itu, setiap orang tua dari peserta didik juga memiliki peran yang cukup penting untuk mempengaruhi seorang anak untuk menciptakan karakter yang diinginkannya. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Cut Zahri Harun (2013) ia juga menyatakan bahwa peranan dari orang tua sangatlah besar pengaruhnya terhadap pendidikan anaknya, karena hubungan diantara keduanya berlangsung sepanjang masa. Hal inilah yang setidaknya sangat mempengaruhi perkembangan baik secara karakter maupun pengetahuan yang dimiliki oleh anak tersebut.

Terlepas dari hal rancangan program yang telah disediakan, sebenarnya program Inseri Pendidikan Anti korupsi (IPAK) ini dibuat dengan mengedepankan kemerdekaan bagi guru sebagai pelaksana pada satuan pendidikannya masing-masing. Merdeka di sini yaitu guru bebas merancang, membuat, dan mengaplikasikan program yang telah dirancangnya asalkan rancangannya tersebut telah disesuaikan dengan tahapan perkembangan dari peserta didik yang ada dalam

naungannya. Namun, dinas pendidikan membuat master utama program dari ini yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran maupun acuan serta memudahkan guru untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan kebutuhan siswanya.

Menurut hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Rosida Tiurma Manurung (2012), ia memaparkan bahwa pendidikan anti korupsi yang dilakukan dalam tingkatan satuan pendidikan merupakan bagian dari satuan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dengan cara mengintegrasikan suatu konsep dengan nilai-nilai moral (*integrated curriculum*) ke dalam perilaku individu yang berkarakter serta humanistik. Hasil penelitian lainnya yang telah dilakukan oleh Nuzus Sakinah dan Nurhasanah Bakhtiar (1019), mereka memaparkan bahwa model pembelajaran pendidikan anti korupsi baiknya dirancang menggunakan metode demokrasi, sehingga nantinya terbentuk suatu skema pembelajaran yang baik. Dalam metode demokrasi tersebut terdapat asas kebersamaan dalam menentukan sesuatu. Selain itu metode yang dapat dipakai menurut mereka yaitu metode keteladanan. Dalam metode tersebut peserta didik langsung mencontoh segala sesuatu dari sumbernya. Keteladanan tersebut tidak serta merta harus dari sosok yang terkenal, bisa juga diperoleh dari orang-orang yang berada dilingkungan sekitar. Kemudian hal-hal lain yang dapat mendukung dalam keterlaksanaan program anti korupsi ini yaitu dengan adanya lingkungan sosial budaya yang baik, buku-buku sumber bacaan, audio visual maupun jaringan internet yang dapat memberikan pemahaman pentingnya nilai-nilai anti korupsi tersebut. Kemudian hasil penelitian dari Siti Ekowati Rusdini, dkk (2016), menyatakan bahwa dalam tahapan pelaksanaan pembelajaran anti korupsi yang dikhususkan kedalam peningkatan karakter kejujuran maka dapat dilakukan dengan program Gerakan Anti Mencontek (GAM), telepon kejujuran, dan warung kejujuran. Kegiatan tersebut telah berhasil meningkatkan karakter jujur pada diri peserta didik. Peningkatan karakter tersebut juga dapat diamati secara langsung tanpa harus melakukan pengujian secara mendalam. Namun jika kita hendak mengamatinya secara langsung, mereka telah memaparkan beberapa indikator yang bisa digunakan dalam prosesnya. Indikator yang dipakai misalnya pada warung kejujuran yaitu dengan menganalisis jumlah uang yang masuk dengan jumlah barang yang keluar.

Keudian dalam pelaksanaan Gerakan Anti Mencontek (GAM), pihak sekolah beserta seluruh siswa bersepakat untuk membudayakan sikap malu jika melakukan suatu kesalahan. Sikap malu tersebut tidak hanya berlaku bagi peserta didik melainkan juga bagi pendidik jika mereka melakukan suatu kesalahan. Misalnya melakukan kegiatan mencontek, membuang sampah sembarangan, serta malu jika datang terlambat ke sekolah,

Dalam beberapa kesempatan saya melihat dan menyaksikan sendiri tentang kurang optimalnya penerapan program Inseri Pendidikan Anti Korupsi (IPAK) ini dilapangan. Seperti tidak dijadikannya program prioritas dalam pembelajaran yang dilakukan. Kemudian seolah-olah program ini hanya dibuat untuk tuntutan laporan saja. Bahkan tidak sedikit yang tidak menerapkannya sama sekali program yang baik ini. Jika kita telisik lebih mendalam, maka sekiranya hal apa yang menyebabkan program anti korupsi ini kurang diminati oleh tenaga pendidik? Apakah kurangnya sosialisasi kepada pendidik? Apakah program yang dirancang masih terkesan kurang jelas? Apakah pendidik kurang memahami pelaksanaan Program Inseri Pendidikan Anti Korupsi (IPAK) ini? Berdasarkan hal tersebut, saya sebagai peneliti telah melakukan penelitian terhadap salah satu sekolah dasar di wilayah Kecamatan Lembang yang terletak di Kabupaten Bandung Barat untuk menganalisis pelaksanaan program Inseri Pendidikan Anti Korupsi (IPAK) di sekolah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana program Inseri Pendidikan Anti Korupsi (IPAK) di Sekolah Dasar Negeri 1 Kayuambon pada wilayah Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka peneliti menguraikan menjadi beberapa pertanyaan penelitian, dan pertanyaan penelitiannya yaitu:

- a. Bagaimana rumusan program Inseri Pendidikan Anti Korupsi (IPAK) di Sekolah Dasar Negeri 1 Kayuambon pada wilayah Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat?

- b. Bagaimana penerapan program Inseri Pendidikan Anti Korupsi (IPAK) di Sekolah Dasar Negeri 1 Kayuambon pada wilayah Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat?
- c. Bagaimana pengaruh program Inseri Pendidikan Anti Korupsi (IPAK) terhadap pengetahuan dan sikap pada peserta didik di Sekolah Dasar Negeri 1 Kayuambon pada wilayah Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, secara umum penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan deskripsi faktual program Insesrsi Pendidikan Anti Korupsi (IPAK) di Sekolah Dasar Negeri 1 Kayuambon pada wilayah Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Tujuan penelitian secara khusus yaitu untuk menghasilkan deskripsi faktual:

- a. Rumusan program Inseri Pendidikan Anti Korupsi (IPAK) di Sekolah Dasar Negeri 1 Kayuambon pada wilayah Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
- b. Proses penerapan program Inseri Pendidikan Anti Korupsi (IPAK) di Sekolah Dasar Negeri 1 Kayuambon pada wilayah Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:
 - 1) Kesiapan guru dalam merancang dan menjalankan program
 - 2) Fasilitas pendukung keberlangsungan program
 - 3) Penilaian keberhasilan keterlaksanaan program
- c. Pengaruh program Inseri Pendidikan Anti Korupsi (IPAK) terhadap pengetahuan dan sikap peserta didik di Sekolah Dasar Negeri 1 Kayuambon pada wilayah Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Kebermanfaatan / nilai signifikansi dari penelitian ini dibagi menjadi beberapa aspek sebagai berikut:

a. Aspek teori

Berdasarkan aspek teori, bahwa pembelajaran yang hendak membiasakan suatu karakter membutuhkan waktu yang panjang dan konsistensi dalam setiap pelaksanaannya. Selain itu juga peserta didik harus berada dalam situasi lingkungan yang kondusif dengan orang-orang yang ada disekitarnya mendukung dalam pembiasaan karakter tersebut.

b. Aspek kebijakan

Berdasarkan aspek kebijakan, bagi pemangku kebijakan di sekolah maupun di dinas pendidikan daerah dapat mempertimbangkan pelaksanaan program Inseri Pendidikan Anti Korupsi (IPAK) yang telah terjadi di SDN 1 Kayuambon wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagai bahan acuan dalam penerapannya.

c. Aspek praktik

Berdasarkan aspek praktik, tesis ini dapat menjadi salah satu opsi sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian diranah yang sama. Selain itu peneliti berharap juga untuk dapat menjadi rujukan bagi tenaga pendidik yang ada di lapangan yaitu para guru dalam penyusunan program ditingkat satuan pendidikannya masing-masing. Sehingga kedepannya hasil dari penelitian ini dapat mempermudah pelaksanaan program Inseri Pendidikan Anti Korupsi (IPAK) yang dalam pelaksanaannya melibatkan peranan wali dari peserta didik.

d. Aspek timbal balik

Berdasarkan aspek timbal balik, tesis ini dapat membentuk karakter positif pada wali peserta didik yang turut serta terlibat dalam program ini, karena mereka ikut menilai perkembangan anaknya yang nantinya dilaporkan kembali kepada guru kelasnya masing-masing.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Menurut narasi yang terdapat dalam pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia (2019), bahwa peneliti hendaknya menyusun urutan penulisan karya ilmiahnya yang berupa tesis kedalam beberapa Bab dan Sub Bab, pemberian nomor, tatacara pengutipan, dan lain sebagainya. Pembahasan pertama dimulai dari mulai Bab I yang berisikan tentang pendahuluan penelitian, di dalamnya memuat uraian tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis. Semuanya dibahas dengan alur yang telah ditentukan. Kemudian dilanjutkan pada Bab II yang berisikan tentang kajian pustaka pendidikan karakter. Dalam Bab tersebut harus diuraikan secara terperinci guna mendapatkan fokus teori dalam penelitian tersebut. Selanjutnya dalam Bab III berisi tentang metode penelitian yang digunakan. Dalam Bab ini peneliti memaparkan secara jelas mengenai prosedur penelitiannya, populasi dan sampel, tempat dan waktu, instrumen, dan teknik pengumpulan data serta analisis datanya. Setelah data diperoleh, maka dilanjutkan pembahasannya dalam Bab IV yang memaparkan tentang hasil penelitian serta pembahasannya. Dalam Bab ini peneliti melakukan pengolahan data sesuai dengan yang telah direncanakan kemudian dibahas secara mendalam. Kemudian untuk yang terakhir ditutup dengan Bab V yang berisikan tentang simpulan, Implikasi dan Rekomendasi untuk langkah selanjutnya.